

Implementasi Industri 4.0 dan Aplikasi Lamikro Untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah

Nurmala Ahmar¹, Diah Ekaningtyas², Nanang Shonhadji³

¹ Sekolah Pascasarjana Universitas Pancasila, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

^{2,3} Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

E-mail: nurmala.ahmar@univpancasila.ac.id

Abstrak

Revolusi industri bukan hanya dari sisi teknologi mesin tetapi juga berkembang ke teknologi informasi, seperti internet dan aplikasi. Usaha mikro berkembang pesat seiring perkembangan teknologi. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) melansir sebanyak 3,79 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (EMKM) sudah memanfaatkan platform online dalam memasarkan produknya. Jumlah ini berkisar 8 persen dari total pelaku EMKM yang ada di Indonesia, yakni 59,2 juta. Mendukung perkembangan tersebut Ikatan Akuntan Indonesia menerbitkan Standar Akuntansi Entitas Menengah Kecil tahun 2016 dan efektif berlaku Januari 2018. Kemenkop UKM menindaklanjuti pemberlakuan standar tersebut dengan menerbitkan aplikasi penyusunan laporan keuangan mikro dengan nama Lamikro (Laporan Keuangan Mikro) pada Oktober 2017. Sampai dengan September 2018 Lamikro telah diunduh lebih dari 5000 pengunduh. Kemudahan, kesederhaan dan fleksibilitas aplikasi tersebut menarik pelaku usaha untuk memanfaatkannya. Implementasi Lamikro pada capaian angka tersebut belum dikatakan berhasil jika dibandingkan dengan 3,79 juta pelaku usaha yang menggunakan platform online apalagi jika dibandingkan dengan 59 juta pelaku usaha mikro di Indonesia. Artikel esai ini bertujuan untuk menggali potensi penggunaan Lamikro dan menawarkan alternatif-alternatif solusi agar implementasi Lamikro berjalan dengan efektif.

Kata Kunci: *lamikro, usaha mikro kecil dan menengah, laporan keuangan, standar akuntansi.*

Abstract

The industrial revolution was not only in terms of machine technology but also developed into information technology, such as the internet and applications. Micro businesses are growing rapidly along with technological developments. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) launched a total of 3.79 million micro, small and medium enterprises (MSMEs) that have used online platforms to market their products. This number is around 8 percent of the total MSME players in Indonesia, which is 59.2 million. Supporting the development of the Indonesian Institute of Accountants issued the Accounting Standards for Small Medium Enterprises in 2016 and effective January 2018. The UKM Ministry of Cooperatives followed up on the implementation of the standard by issuing applications for the preparation of

microfinance reports under the Lamikro (Microfinance Report) in October 2017. September 2018 Lamikro has been downloaded more than 5000 downloaders. Convenience, simplicity and flexibility of the application attracts business people to use it. Lamikro's implementation on the achievement of these figures has not been said to be successful when compared to the 3.79 million business people who use online platforms especially if compared to 59 million micro-entrepreneurs in Indonesia. This essay aims to explore the potential of using Lamikro and offer alternative solutions so that the implementation of Lamikro effectively.

Keywords: *lamikro, micro small and medium enterprises, financial report, accounting standards.*

PENDAHULUAN

Revolusi industri bukan hanya dari sisi teknologi mesin tetapi juga berkembang ke teknologi informasi, seperti internet dan aplikasi. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah Makro (SAK EMKM) dirancang secara khusus sebagai patokan standar akuntansi keuangan pada EMKM. Standar Keuangan ini disusun dan disahkan oleh IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia sebagai sebuah organisasi profesi yang menaungi seluruh akuntan di Indonesia. SAK EMKM ini merupakan salah satu dorongan kepada pengusaha-pengusaha di Indonesia agar dapat berkontribusi secara signifikan dalam pengembangan EMKM yang lebih maju. Mengapa hal ini sangat dibutuhkan untuk usaha terutama EMKM? Karena laporan keuangan merupakan hal yang penting dalam sebuah usaha.

Berdasarkan definisi SAK EMKM, definisi dan kriteria EMKM didasarkan pada hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia, setidaknya selama dua tahun berturut-turut. Berikut ini adalah definisi EMKM sebagaimana diatur oleh UU No. 20 tahun 2008. Usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh individu dan / atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih maksimal sebesar 50 juta rupiah dan penjualan tahunan dengan maksimum 300 juta rupiah. Usaha skala kecil adalah perusahaan ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikendalikan, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Perusahaan Besar yang memiliki aset bersih maksimal 50 juta rupiah dan penjualan tahunan dengan maksimal 500 juta rupiah. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang mandiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikendalikan, atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Besar dengan jumlah neto maksimum senilai 300 juta rupiah dan penjualan tahunan dengan maksimal 2 miliar rupiah.

Jumlah usaha mikro di tanah air saat ini mencapai 59 juta unit usaha. Para pelaku usaha mikro tersebut umumnya belum memiliki tata kelola administrasi maupun laporan keuangan. Hal ini seringkali menjadi hambatan bagi usaha mikro karena tidak bisa menghitung keuangan dengan baik khususnya terkait arus kas. Bagi usaha mikro, membuat laporan keuangan dianggap sulit dan merepotkan. Padahal tata kelola keuangan sangat penting untuk mengetahui omzet harian maupun bulanan agar bisa melakukan perencanaan pengembangan usaha lebih lanjut.

Mengembangkan usaha dengan menggunakan aplikasi laporan keuangan akuntansi sudah sangat diharuskan. Sebab dengan aplikasi semacam itu, usaha mikro dapat memonitoring aktivitas keuangan UKM mereka. Aplikasi laporan keuangan akuntansi ini memungkinkan pengguna dapat membuat laporan keuangan dengan lebih cepat dan efisien. Dengan pertimbangan kondisi riil tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM melalui Deputi Bidang Sumber Daya Manusia mengembangkan sebuah aplikasi yang disebut Lamikro (Laporan Akuntansi Usaha Mikro) untuk membantu pelaku usaha mikro membuat sistem laporan keuangan sederhana dan mudah digunakan.

Pemerintah mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar mampu menyajikan pembukuan usaha yang layak di tengah era revolusi industri 4.0. Aplikasi Lamikro ini dapat diakses kapan dan di mana saja, cukup hanya melalui ponsel berbasis operasi Android. Selain itu Lamikro juga dapat diakses melalui website www.lamikro.com. Aplikasi ini dirancang fleksibel dengan banyak pilihan berbasis pengguna. Aplikasi ini juga mampu beradaptasi dengan berbagai prosedur penganggaran dan cukup kuat untuk menggantikan metode tradisional pencatatan manual. Melalui aplikasi Lamikro, pelaku usaha mikro dapat menghitung arus kas, belanja, pendapatan dan laba secara mudah.

Pelaku UKM mengaku mendapatkan manfaat setelah menggunakan aplikasi Lamikro dari Kementerian Koperasi dan UKM. Selama ini pelaku usaha mikro belum memiliki tata kelola administrasi maupun laporan keuangan secara baik sehingga kehadiran aplikasi tersebut dianggap memberi kemudahan bagi mereka. Lamikro diluncurkan sejak Oktober 2018. Devany (2017) menemukan bahwa pelaku usaha kecil membutuhkan teknologi informasi yang mudah untuk mendukung pengelolaan keuangan mereka. Sosialisasi secara berkesinambungan dan merata ke seluruh pelaku usaha sangat diharapkan dapat diberikan oleh pihak-pihak yang berkompeten (Badria dan Diana, 2018). Oleh karenanya kementerian UKM menargetkan sosialisasi sampai dengan satu juta pelaku usaha mikro sampai dengan Mei 2018.

Kesiapan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah memerlukan pendampingan secara intensif (Samsiah dan Lawita, 2017; Sulistyowati, 2017). Utamanya pada pengetahuan

pemahaman tentang nilai wajar (Pratiwi, 2018). Bukti implementasi SAK EMKM telah dilakukan oleh Hetika dan Mahmudah (2018), Devany (2017), Badria (2018), Ningtyas (2018), Tatik (2018), Hurriyaturrahman (2018) dan Shonhadji, dkk (2017). Islah (2017) dan Fatmawati, dkk (2017) juga telah melakukan pelatihan keuangan berbasis pada standar tersebut. Bukti implementasi juga telah dilakukan pada beberapa bidang usaha, antara lain usaha peternakan ikan nila keramba (Primayudia, 2017), usaha dagang Amani (2018) dan Ulan (2017), usaha konveksi dan fashion (Sartika, 2017; Riadi, 2017). Penerapan SAK EMKM pada bidang usaha lainnya telah dilakukan Wardi (2014) dan Kartika, dkk (2017) pada industri makanan, roti dan kue. Pelaku usaha tanaman produktif jamur (Farida, 2018).

Potensi dan kebutuhan usaha kecil, menengah dan mikro di Indonesia yang menanti dan membutuhkan pendampingan lebih dari dari 59 juta. Pemerintah, melalui kementerian-kementerian terkait perlu untuk bersinergi dan berkoordinasi untuk mensukseskan implementasi standar akuntansi EMKM sekaligus penggunaan aplikasi Lamikro untuk entitas mikro, kecil dan menengah. Kementerian terkait dengan program ini antara lain, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi, dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) melansir sebanyak 3,79 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (EMKM) sudah memanfaatkan platform online dalam memasarkan produknya. Jumlah ini berkisar 8 persen dari total pelaku EMKM yang ada di Indonesia, yakni 59,2 juta.

Kajian dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi media bagi para akademisi untuk melakukan aktivitas pengabdian kepada masyarakat. Hasil kajian juga diharapkan dapat menjadi dasar bagi perusahaan public khususnya badan usaha milik negara untuk menyusun dan mengoptimalkan aktivitas peranggungjawaban social. Perusahaan dapat berperan dalam kesuksesan implementas Lamikro dengan cara mewajibkan UKM (Usaha Kecil Menengah) yang menjadi mitra binaannya untuk wajib menyusun laporan keuangan dengan menggunakan Lamikro.

LAPORAN KEUANGAN ENTITAS MIKRO KECIL MENENGAH

SAK EMKM mengatur cara penyajian laporan keuangan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah secara detil. Informasi keuangan harus disajikan secara konsisten, komparatif, dan lengkap. Laporan keuangan standar, terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan berisi kebijakan akuntansi dan catan-catan yang relevan denagn akun-akun yang disajikan dalam laporan keuangan.

Secara detil informasi akuntansi terdiri dari informasi tentang aset, liabilitas dan ekuitas disajikan pada laporan posisi keuangan. Laporan laba rugi menyajikan pendapatan dan beban selama satu periode tertentu. Definisi atas aset, liabilitas, dan ekuitas adalah sebagai berikut.

- **Aset** merupakan sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan yang dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh oleh entitas. Aset sendiri terbagi menjadi dua macam yaitu aset yang memiliki wujud dan aset tidak memiliki wujud (tak berwujud).
- **Liabilitas** merupakan kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Karakteristik esensial dari liabilitas adalah kewajiban yang dimiliki entitas saat ini untuk bertindak atau untuk melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu yang dapat berupa kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif. Kewajiban konstruktif yaitu kewajiban yang biasanya melibatkan pembayaran kas, penyerahan aset selain kas, pemberian jasa, dan/atau penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban lain.
- **Ekuitas** adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya. Klaim ekuitas adalah klaim atas hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya. Klaim ekuitas merupakan klaim terhadap entitas, yang tidak memenuhi definisi liabilitas.

Laporan laba rugi sebuah EMKM mencakup informasi tentang pendapatan, beban keuangan serta beban pajak pada suatu entitas. Sesuai dengan SAK EMKM, laporan laba rugi memasukkan semua penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode, kecuali ED SAK EMKM mensyaratkan lain.

Catatan atas laporan keuangan yang disusun dalam SAK EMKM harus memuat tentang Sebuah pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan ED SAK EMKM, ikhtisar kebijakan akuntansi, dan, informasi tambahan dan rincian akun tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan. Setiap catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis selama hal tersebut terbilang praktis. Setiap akun dalam laporan keuangan merujuk-silang ke informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan agar mendapatkan informasi yang tepat, akurat, serta relevan.

SAK EMKM, diharapkan entitas telah menerapkan SAK EMKM ini pada periode tahun buku setelah 1 Januari 2018. Jika ingin menerapkan SAK EMKM tetapi belum tahu cara memulainya maka pelaku usaha dapat menyusun laporan keuangan pertama yang sesuai dengan SAK EMKM. Laporan pertama sesuai dengan ED SAK EMKM adalah laporan keuangan pertama dimana entitas membuat pernyataan secara eksplisit dan tanpa terkecuali

tentang kepatuhan terhadap ED SAK EMKM dalam catatan atas laporan keuangannya. SAK EMKM memang ditujukan sebagai laporan keuangan EMKM agar semakin mudah dalam menyusun serta membuatnya. Ikatan Akuntan Indonesia menyarankan agar para pelaku usaha mikro, kecil, menengah memastikan diri untuk menyusun laporan keuangan dengan menggunakan standar tersebut pada tahun 2018. Kemenkop UKM menindaklanjuti upaya tersebut dengan mendesaian aplikasi Lamikro yang dapat diunduh secara gratis.

SOSIALISASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (SAK EMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (EMKM) terbukti telah mendorong dan merangsang pertumbuhan ekonomi nasional secara berkesinambungan. Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop dan UKM) menunjukkan bahwa 97% lapangan kerja diberikan oleh EMKM sehingga berkontribusi signifikan mengurangi pengangguran di Indonesia. Melihat peran penting tersebut, maka dibutuhkan dukungan dari seluruh pihak untuk mengembangkan dan mewujudkan EMKM yang maju, mandiri, dan modern.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai organisasi profesi yang menaungi seluruh akuntan di Indonesia, senantiasa memenuhi komitmennya untuk turut memajukan perekonomian negara. Sebagai bagian organisasi IAI yang mempunyai otonomi untuk menyusun dan mengesahkan standar akuntansi keuangan, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) IAI telah mengesahkan Exposure Draft Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (ED SAK EMKM) menjadi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) dalam rapatnya tanggal 24 Oktober 2016. Hal ini menjadi bukti besarnya perhatian IAI untuk seluruh pelaku ekonomi, terutama EMKM. SAK EMKM ini sengaja dibuat sederhana agar menjadi Standar Akuntansi Keuangan yang mudah dipahami oleh sekitar 57,9 juta pelaku EMKM.

Kerangka pelaporan keuangan SAK EMKM ini diharapkan dapat membantu entitas dalam melakukan transisi dari pelaporan keuangan yang berdasar kas ke pelaporan keuangan dengan dasar akrual. Penerbitan SAK EMKM ini diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong literasi keuangan bagi EMKM di Indonesia sehingga memperoleh akses yang semakin luas untuk pembiayaan dari industri perbankan. Kedepannya, SAK EMKM ini juga diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan dan pengembangan pedoman atau panduan akuntansi bagi EMKM yang bergerak di berbagai bidang usaha. SAK EMKM ini akan berlaku efektif per 1 Januari 2018 dengan penerapan dini diperkenankan.

IAI mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah berkontribusi memberikan tanggapan dan masukan untuk penyempurnaan standar ini di mana batas penyampaian tanggapan publiknya sudah ditutup sejak tanggal 23 September 2016 lalu. IAI juga ingin memberikan apresiasi kepada seluruh anggota Working Group (WG) yang aktif berpartisipasi memberikan masukan dan meluangkan waktunya untuk hadir dalam beberapa undangan pertemuan guna membahas ED SAK EMKM. Anggota WG meliputi:

1. Asosiasi pelaku EMKM: Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), dan Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (HIPMIKINDO).
2. Asosiasi perbankan: Himpunan Bank-bank Milik Negara (HIMBARA), Perhimpunan Bank-bank Umum Nasional (PERBANAS), Perhimpunan Bank-bank Internasional Indonesia (PERBINA), dan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda).
3. Regulator: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Koperasi dan UKM, dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI).
4. Akuntan publik: Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).
5. Tim Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (TISAK IAI).
6. Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pajak (IAI KAPj).

LAMIKRO: APLIKASI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERBASIS ANDROID

Jumlah usaha mikro di tanah air saat ini mencapai 59 juta unit usaha. Para pelaku usaha mikro tersebut umumnya belum memiliki tata kelola administrasi maupun laporan keuangan. Hal ini kerap menjadi hambatan bagi usaha mikro karena tidak bisa menghitung keuangan dengan baik khususnya terkait arus kas. Hal tersebut mendasari Kementerian Koperasi dan UKM melalui Deputi Bidang Sumber Daya Manusia mengembangkan sebuah aplikasi yang disebut LAMIKRO (Laporan Akutansi Usaha Mikro) untuk membantu pelaku usaha mikro membuat sistem laporan keuangan sederhana dan mudah digunakan.

Aplikasi Lamikro ini dapat diakses kapan dan di mana saja, cukup hanya melalui ponsel berbasis operasi Android. Selain itu Lamikro juga dapat diakses melalui website www.lamikro.com. Aplikasi ini dirancang fleksibel dengan banyak pilihan berbasis pengguna. Aplikasi ini juga mampu beradaptasi dengan berbagai prosedur penganggaran dan cukup kuat untuk menggantikan metode tradisional pencatatan manual.

Melalui aplikasi Lamikro pelaku usaha mikro dapat menghitung arus kas, belanja, pendapatan dan laba secara mudah. Aplikasi Lamikro juga sudah memenuhi standar akutansi Entitas Mikro Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh Ikatan Akutansi Indonesia. Selama ini pelaku usaha mikro belum memiliki tata kelola administrasi maupun laporan keuangan secara baik sehingga kehadiran aplikasi tersebut dianggap memberi kemudahan

Mengembangkan bisnis dengan menggunakan Aplikasi Laporan Keuangan Akuntansi sudah sangat diharuskan, tujuannya agar para pengguna dalam hal ini para penggerak UKM Mikro seluruh Indonesia dapat memonitoring aktifitas keuangan UKM mereka. Aplikasi Laporan Keuangan Akuntansi ini memungkinkan pengguna dapat membuat laporan keuangan dengan lebih cepat dan efisien.

Aplikasi pembukuan ini dapat diakses kapan saja & di mana saja. Aplikasi ini dirancang untuk menjadi fleksibel dengan banyak pilihan berbasis pengguna. Ini akan beradaptasi dengan berbagai prosedur penganggaran dan cukup kuat untuk menggantikan metode tradisional pencatatan manual.

UPAYA IMPLEMENTASI LAMIKRO SECARA TERINTEGRASI

Tugas dan fungsi Kementerian Koperasi dan UKM telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara pasal 552, 553 dan 554, yaitu: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Fungsi Kementerian Koperasi dan UKM adalah:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan
5. Penyelenggaraan fungsi teknis pelaksanaan pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan undang-undang di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

Meskipun Kementerian Koperasi dan UKM yang memfasilitasi Lamikro sebagai media untuk menyusun laporan keuangan yang diklaim telah berbasis SAK EMKM, sosialisasi aplikasi untuk diimplementasikan perlu dirancang dengan baik.

Beberapa Lembaga pemerintah memberikan wadah untuk pemberdayaan usaha kecil menengah, Badan Ekonomi Kreatif (Bekraft), Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah (Dirjen IKM) dibawah Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Bahkan Kementerian Badan Usaha Milik Negara mewajibkan perusahaan-perusahaan milik negara memiliki mitra binaan usaha kecil menengah. Berdasarkan laporan keberlanjutan PT. Telkom, Tbk, tercatat jumlah mitra binaan tahun 2017 sejumlah 8367 mitra binaan (Telkom, 2017). Mitra binaan PT Semen Indonesia sampai dengan tahun 2017 tercatat sejumlah 37.612 naik sejumlah 6,49% dari tahun sebelumnya. Jumlah perusahaan badan usaha milik negara yang go public

sebanyak 18 perusahaan (Prasarana dan Samudera, 2018), dan dapat dipastikan bahwa mereka memiliki banyak mitra binaan.

Implementasi Lamikro dan sosialisasinya membutuhkan dukungan dan integrasi banyak lembaga pemerintah. Upaya berkolaborasi dan koordinasi antar Lembaga tersebut diharapkan dapat membawa akselerasi implementasi Lamikro di kalangan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Upaya kerjasama lintas Lembaga ini diharapkan juga dapat menekan biaya implementasi dan sosialisasi dan program kerja masing-masing Lembaga tepat sasaran dan terpadu. Adapun usulan alternatif implementasi tersebut adalah, pertama, mewajibkan perusahaan *public* yang memiliki mitra ukm pada program pertanggungjawaban social untuk menggunakan Lamikro sebagai media penyusunan laporan keuangan. Kedua, Kemenkop UKM bekerjasama dengan Kemenristekdikdi untuk memberikan skema khusus pengabdian kepada masyarakat bagi dosen untuk pendampingan implementasi Lamikro. Ketiga, Kementerian Pedesaan, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Koperasi hendaknya bekerjasama dengan semua jajaran di kementerian yang memiliki program yang bersentuhan dengan industry kecil menengah (misalnya Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dibawah kementeria Perindustrian) bersinergi dan berkolaborasi menyusun kebijakan terkait implementasi Lamikro tersebut. Harapan besar lainnya adalah usaha mikro, keci menengah dapat bersaing untuk mencari modal di bursa saham.

SIMPULAN

Revolusi industri tidak hanya ditinjau dari sisi teknologi mesin tetapi juga berkembang ke teknologi informasi, seperti internet dan aplikasi. Pemerintah berupaya mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk memiliki kemampuan untuk menyajikan pembukuan usaha yang layak di tengah era revolusi industri 4.0. Perusahaan mikro, kecil dan menengah terbukti tahan terhadap ketika krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997 (paling parah), 2008 (krisis subprime mortgage di Amerika Serikat) dan 2013 (kondisi keuangan global yang melemah) (smartbisnis.co.id, 2016). Salah satu kelemahan utama perusahaan mikro, kecil, menengah adalah tidak mampu untuk membayar jasa tenaga ahli untuk mengerjakan pekerjaan tertentu yang disebabkan karena keterbatasan dana yang dimiliki, misalnya dalam penyusunan laporan keuangan. Ikatan Akuntan Indonesia telah memfasilitasi satandar akuntansi keuangan untuk EMKM agar penyajian laporan keuangan seragam dan tidak multi interpretasi.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) memfasilitasi tatantangan industri 4.0 dengan memberikan fasilitas kemudahan penyusunan laporan keuangan dengan menciptakan aplikasi Lamikro. Hal penting yang harus dipikirkan adalah bagaimana cara mendiseminasi aplikasi Lamikro agar dapat dikenaldan dimanfaatkan oleh lebih dari 59 juta usaha mikro, kecil dan menengah. Artikel ini memberikan usulan beberapa alternative. Pertama,

mewajibkan perusahaan public yang memiliki mitra ukm pada program pertanggungjawaban social untuk menggunakan Lamikro sebagai media penyusunan laporan keuangan. Kedua, Kemenkop UKM bekerjasama dengan Kemenristekdikdi untuk memberikan skema khusus pengabdian kepada masyarakat bagi dosen untuk pendampingan implementasi Lamikro. Ketiga, Kementerian Pedesaan, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Koperasi hendaknya bekerjasama dengan semua jajaran di kementerian yang memiliki program yang bersentuhan dengan industry kecil menengah (misalnya Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dibawah kementeria Perindustrian) bersinergi dan berkolaborasi menyusun kebijakan terkait implementasi Lamikro tersebut. Upaya tersebut diharapkan dapat membawa akselerasi dan efisiensi biaya implementasi Lamikro di Indonesia. Jika implementasi Lamikro dapat berjalan dengan baik, masalah lain usaha mikro, kecil, menengah terkait unbankable akan teratasi.

REFERENSI

- Amani, T. (2018). Penerapan SAK-EMKM sebagai Dasar Penyusunan Laporan Keuangan EMKM (Studi Kasus di UD Dua Putri Solehah Probolinggo). *Asset, Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan Dan Pajak*, 2(2), 12–20.
- Badria, N., & Diana, N. (2018). Persepsi Pelaku EMKM Dan Sosialisasi SAK EMKM Terhadap Diberlakukannya Laporan Keuangan Yang Berbasis Sak EMKM 1 Januari 2018. *Jurnal Riset Akuntansi*, 7(1), 55–66.
- Devany, A. M. (2017). Analisis Kebermanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Yang Dapat Menghasilkan Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) Pada EMKM Dengan Omzet Kecil (Studi Kasus Pada EMKM ARA). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 6(1).
- Farida, F. (2018). Penerapan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM Pada EMKM Bitu Jamur Di Desa Sidomulyo Kota Batu. *Jurnal Agregat*, 3(1).
- Fatmawati, Hasiyah, Irmawati, & Istiyana, A. N. (2017). IBM Pelatihan Dan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan In Prosiding Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (SNP2M) (Vol. 2017, pp. 104–108).
- Hetika, H., & Mahmudah, N. (2018). Penerapan Standar Akuntansi Entitas Mikro Kecil Dan Menengah (SAK EMKM) Dalam Menyusun Laporan Keuangan. *Jurnal Bisnis Terapan*, 2(1), 81–104.
- Hurriyaturrahman, Yudhawati, D., & Marlina, A. (2017). Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Bagi EMKM Dalam Menyongsong Penerapan SAK EMKM Di Desa Bojong Rangkas Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor. In *Prosiding LPPM UIKA Bogor* (pp. 51–60).

<https://www.smartbisnis.co.id/content/read/belajar-bisnis/inspirasi-bisnis/alasan-EMKM-lebih-tahan-krisis-dibanding-perusahaan-besar>, Juni 2016.

Islah, M., Jayadi, M., & Sila, M. (2017). *IbM Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Usaha Kecil Menengah*, Prosiding Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (SNP2M) (pp. 262–265).

Kartika, T. P. N. D., Kurniawati, S. L., & Metana, N. Y. (2017). *Pelaporan Keuangan pada EMKM di Surabaya (Studi Pada UKM Diah Cookies)*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis* Volume, 2(1), 1–10.

Ningtyas, J. D. A. (2018). *Penyusunan Laporan Keuangan EMKM Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK-EMKM) (Study Kasus Di EMKM Bintang Malam Pekalongan) Jilma*. *Politeknik Pusmanu*, 1(1), 1–9.

Prasarana, P., & Samudera, P. (2018). *Daftar BUMN Indonesia*.

Pratiwi, D. (2018). *Penerapan Fair Value dan Historical Cost Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Entitas Mikro Kecil Menengah (EMKM)*. *Balance Vocation Accounting Journal*, 2(1), 1–15.

Primayudia, D. *Penyusunan Laporan Keuangan Usaha Budidaya Ikan Nila Di Keramba “Sejahtera” Berbasis SAK EMKM*. *Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN (KIAFE)*, 6(2).

Riadi, M. Z. I. *Penerapan Laporan Keuangan Berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Dan Menengah (SAK EMKM) Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (EMKM) Wooft Konveksi*. *Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN (KIAFE)*, 6(2).

Samsiah, S., & Lawita, N. F. (2017). *Review the Readiness of MSMEs in Indonesia Compliance with Accounting Standards Micro , Small and Medium Enterprise (SAK EMKM)*. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 7(2), 115–120.

Sartika, D. *Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Dan Menengah (SAK-EMKM) Pada Usaha Kecil Menengah (Ukm) Nisa Fashion*. *Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN (KIAFE)*, 6(3).

Semen, I. (2017). *Laporan Tahun Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Semen Gresik*.

Shonhadji, N., Africa, L. A., & Djuwito. (2017). *Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan Pada Usaha Kecil Menengah Berdasarkan SAK EMKM Di Surabaya*. In *Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat* (pp. 130–136).

- Sulistiyowati, Y. (2017). Listing Registration of SME Financial Reporting (A Case Studi In Malang). *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi*, 5(2), 49–55.
- Suryolaksano, B. (2015). Studi Deskriptif Tentang Program Disperindag Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Kerajinan Tangan (Handycraft) Di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya Bagus Suryolaksano. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 3(1), 1–21.
- Tatik. (2018). Implementasi SAK EMKM (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Dan Menengah) Pada Laporan Keuangan. *Jurnal Relasi*, XIV(2), 1–14.
- Telkom. (2017). *Enhancing Digital Community Development & Culture Laporan Tahunan PKBL PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 2017*.
- Ulan, U. P. Penyusunan Laporan Keuangan Pada Perusahaan Dagang Berbasis SAK EMKM (Studi Kasus Usaha Dagang Deni Distro). *Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi Untan (Kiafe)*, 7(1).
- Wardi, J. (2014). Penerapan Pencatatan Keuangan pada Usaha Kecil dan Menengah (Studi pada USAha Lopek Bugi Danau Bingkuang). *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis*, 6(3), 197-207.
- Wicaksono, P. E., <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2446953/bertahan-saat-krisis-ukm-jadi-tulang-punggung-ekonomi-ri>, 26 Februari 2016.